

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2004), penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Menurut Sugiyono (2004), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain.

Berdasarkan teori tersebut diatas, maka penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dalam penelitian adalah penelitian dengan memperoleh data dalam hal ini data tersebut adalah dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Kota Bandar Lampung periode 2006-2013, dimana di dalamnya terdapat angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atas variabel yang diwakilinya, kemudian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data berupa angka-angka yang termuat dalam dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2006-2013. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengertian dari data sekunder menurut Sugiyono (2004) adalah "sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen".

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2006-2013 yang telah disusun oleh Badan/Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang dipublikasi melalui portal Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK), Departemen Keuangan Republik Indonesia.

C. Definisi Operasional Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa indikator beserta rasio-rasio guna melihat kinerja keuangan daerah Kota Bandar Lampung. Definisi operasional masing-masing rasio penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya. Rasio kemandirian juga

menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan kemampuan masyarakat dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah, mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.

Gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah yang bersangkutan agar mampu membangun daerahnya dan bersaing dengan daerah-daerah lainnya. Upaya nyata dalam mengukur tingkat kemandirian daerah dilakukan dengan cara membandingkan besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan bantuan yang diperoleh dari pemerintah pusat, provinsi dan pinjaman (bantuan ekstern). Formula untuk menghitung Rasio Kemandirian Daerah adalah (Halim, 2004):

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektifitas

Rasio efektivitas menggambarkan perbandingan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Formula untuk menghitung rasio efektivitas anggaran suatu pemerintah daerah adalah (Halim, 2004) :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien, apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi, mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah semakin baik.

Untuk itu, pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat, besar biaya yang perlu dikeluarkan guna merealisasikan seluruh kegiatan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan pendapatan yang diterimanya, sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pembiayaan tersebut efisien atau tidak. Hal ini perlu dilakukan, karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, keberhasilan tersebut kurang berarti apabila ternyata realisasi biaya yang dikeluarkannya lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya. Formula untuk menghitung rasio efisiensi anggaran suatu pemerintah daerah adalah (Halim, 2004):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dalam Kepmendagri No. 35 Tahun 2002 tercantum anggaran upah pungut untuk pajak daerah dan PBB yang ditentukan pemerintah pusat, yaitu maksimal 5 %. Yang juga di ikuti dengan keluarnya PP No. 69 Tahun 2010 pada pasal 6 ayat (1) yang berisi:

- a. Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 3% (tiga perseratus) untuk provinsi; dan
- b. 5% (lima perseratus) untuk kabupaten/kota, dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.

Upah pungut itu sendiri diatur dengan PP No. 65 Tahun 2001 dan Permendagri No. 32 Tahun 2002. Aturan mainnya, petugas pemungut pajak berhak menerima 5 persen dari jumlah pajak yang dikumpulkan.

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi daerah mana yang perlu mendapatkan perhatian. Formula untuk menghitung rasio pertumbuhan PAD suatu pemerintah daerah adalah (Halim, 2004):

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD } t_1 - \text{PAD } t_0}{\text{PAD } t_0} \times 100\%$$

dimana: t_0 = tahun awal
 t_1 = tahun akhir

D. Tehnik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2006) yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah “cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya”.

Berdasarkan pengertian tersebut cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang di perlukan dalam penelitian adalah dokumentasi. Menurut Arikunto (2006) “dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya”.

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis, gambar, maupun elektronik, dan dokumen-dokumen tersebut dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.

E. Tehnik Analisis Data

Untuk mengukur kinerja keuangan di Kota Bandar Lampung digunakan analisis rasio keuangan (Halim, 2004), yaitu dengan menghitung rasio keuangan dari pos-pos dalam realisasi anggaran yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk tahun anggaran 2006-2013.

Formulasi rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan kemampuan masyarakat dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah, mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.

Gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah yang bersangkutan agar mampu membangun daerahnya dan bersaing dengan daerah-daerah lainnya. Upaya nyata dalam mengukur tingkat kemandirian daerah dilakukan dengan cara membandingkan besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan bantuan yang diperoleh dari pemerintah pusat, provinsi dan pinjaman (bantuan ekstern). Formula untuk menghitung Rasio Kemandirian Daerah adalah (Halim, 2004):

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100$$

Adapun kriteria kemandirian, penilaiannya dapat dilihat pada Tabel 7. di bawah ini:

Tabel 7. Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	> 25 - 50	Konsultif
Sedang	> 50 - 75	Partisipatif
Tinggi	> 75 - 100	Delegatif

Sumber: Halim, 2004.

Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar pemerintah daerah, terutama dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, dapat dilakukan dengan cara mengukur kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah. Menurut Halim (2004) terdapat empat macam pola yang memperkenalkan “hubungan situasional” dalam pelaksanaan otonomi daerah, antara lain :

- a) Pola hubungan *instruktif*, yaitu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
- b) Pola hubungan *konsultatif*, yaitu pola hubungan dimana campur tangan pemerintah sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu untuk melaksanakan otonomi daerah.
- c) Pola hubungan *partisipatif*, yaitu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat tingkat kemandirian

daerah melebihi 50%, sehingga daerah yang bersangkutan lebih mendekati mampu untuk melaksanakan otonomi daerah.

- d) Pola hubungan *delegatif*, merupakan pola hubungan dimana campur tangan pemerintah pusat tidak lebih dari 25%, bahkan nyaris tidak ada.

2. Rasio Efektifitas

Rasio efektivitas menggambarkan perbandingan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Formula untuk menghitung rasio efektivitas anggaran suatu pemerintah daerah adalah (Halim, 2004) :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Namun demikian, tingginya rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Adapun kriteria efektifitas, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian kinerja dalam tabel 8. berikut ini:

Tabel 8. Kriteria Efektifitas

Kriteria	Rasio Efektifitas (%)
Sangat Efektif	> 100
Efektif	100
Cukup Efektif	90 - 99
Kurang Efektif	75 - 89
Tidak Efektif	> 75

Sumber: Halim, 2004.

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien, apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi, mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah semakin baik.

Untuk itu, pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat, besar biaya yang perlu dikeluarkan guna merealisasikan seluruh kegiatan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan pendapatan yang diterimanya, sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pembiayaan tersebut efisien atau tidak. Hal ini perlu dilakukan, karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, keberhasilan tersebut kurang berarti apabila ternyata realisasi biaya yang dikeluarkannya lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya. Formula untuk menghitung rasio efisiensi anggaran suatu pemerintah daerah adalah (Halim, 2004):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisien, perbandingannya diukur dengan kriteria pengukuran kinerja ekonomis dapat dilihat dalam Tabel 9. berikut ini:

Tabel 9. Kriteria Efisiensi

Kriteria	Rasio Efektifitas (%)
Sangat Efisien	< 5
Efisien	> 5 - 10
Cukup Efisien	> 11 - 20
Kurang Efisien	> 21 - 30
Tidak Efisien	> 30

Sumber: Halim, 2004.

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi daerah mana yang perlu mendapatkan perhatian. Formula untuk menghitung rasio pertumbuhan PAD suatu pemerintah daerah adalah (Halim, 2004):

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD } t_1 - \text{PAD } t_0}{\text{PAD } t_0} \times 100\%$$

dimana: t_0 = tahun awal
 t_1 = tahun akhir